

BAB IV

KEBIJAKAN PERDAMAIAN DI MINDANAO DI BAWAH PRESIDEN BENIGNO AQUINO III

Presiden Benigno Aquino III yang menjabat di tahun 2010, sudah mengetahui perkembangan dan upaya proses perdamaian yang pernah diupayakan presiden sebelumnya. Situasi dan kondisi yang sudah berbeda di Mindanao ditambah juga hasil-hasil upaya negosiasi yang pernah dibuat sebelumnya. Hal ini membuat presiden Benigno Aquino III cukup berhati-hati dalam membuat kebijakan.

Pentingnya kebijakan presiden Benigno Aquino III akan mempengaruhi proses perdamaian di Mindanao. Kebijakan-kebijakan politik, ekonomi, militer yang dibuat untuk mendukung proses perdamaian di Mindanao. Sehingga proses perdamaian di Mindanao bisa cepat terwujud.

A. Kebijakan Militer dan Perdamaian

Konflik yang terjadi di Mindanao sudah terjadi cukup lama dan menelan banyak korban jiwa, baik dari sisi pemerintah Filipina maupun kelompok perjuangan Mindanao seperti MNLF (*Moro National Liberation Front*) dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) yang ingin memperjuangkan kemerdekaan bagi Mindanao. Salah satu upaya yang dilakukan oleh kelompok perjuangan seperti MNLF (*Moro National Liberation Front*), MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) dan Abu Sayyaf dengan senjata.

Pemerintah Filipina juga mengambil kebijakan militer untuk menanggulangi sikap militer yang di ambil kelompok MNLF (*Moro National Liberation Front*), MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) serta Abu Sayyaf. Kebijakan tersebut menghasilkan permasalahan baru dari sisi pemerintahan Filipina, dimana pemerintah Filipina harus mengeluarkan biaya ekstra untuk dialokasikan ke sektor militer.

Kerugian secara finansial yang dirasakan pemerintah Filipina juga dirasakan masyarakat yang berada di Mindanao. Kerugian yang dialami seperti rusaknya properti akibat terkena tembakan senjata atau bom serta kerugian ekonomi. Kebijakan pemerintah Filipina yang represif dan menggunakan militer pernah diterapkan oleh presiden Ferdinand Marcos yang menjabat selama 20 tahun dari 1965-1986, serta presiden Joseph Estrada yang menjabat di tahun 1998-2001 yang kemudian digantikan oleh Arroyo.

Salah satu kebijakan All Out War yang dibuat tahun 2000 menghabiskan dana 1,3 Milyar Peso¹. Besarnya alokasi dana yang dikucurkan oleh pemerintah Filipina untuk kebijakan All Out War merupakan salah satu biaya yang harus dibayarkan untuk membiayai persenjataan dan militernya. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk operasi militer antara tahun 1970-1996 antara pemerintah Filipina dengan MNLF (*Moro National Liberation Front*) menghasilkan beban biaya militer sebesar 73 milyar Peso.²

¹ Barandiaran, Edgardo (2002). "Economic Costs of the Mindanao Conflict". An unpublished report submitted to the world Bank - Office in Manila

² *ibid*

Presiden Arroyo yang menjabat selama 10 tahun sudah berupaya untuk menyelesaikan konflik dengan cara mediasi seperti *Formal Exploratory Talks*. Hal ini diteruskan dan dilanjutkan oleh presiden Benigno Aquino III untuk menyelesaikan konflik di Mindanao. Penggunaan *positive peace* dan *negative peace* dalam kategori *survival* diterapkan dalam upaya perdamaian di Mindanao oleh presiden Benigno Aquino III.

Positive peace yang cenderung untuk menyelesaikan konflik melalui rekonsiliasi dan rekonstruksi perdamaian, sedangkan *negative peace* cenderung untuk meminimalisir baku tembak yang terjadi antar kedua kelompok yang berkonflik serta genjatan senjata. Presiden Benigno Aquino sebagai kepala tertinggi negara memilih langkah untuk menyelesaikan konflik di Mindanao dengan kedua cara tersebut.

Keseriusan presiden Benigno Aquino III dalam menyelesaikan konflik di Mindanao bukan hanya sekedar intrik politik atau politik pencitraan. Keseriusan dalam menyelesaikan konflik terlihat dari masa awal kepresidenannya. Sikapnya untuk meneruskan *Formal Exploratory Talks* yang sudah berjalan pada masa presiden Arroyo diteruskan. Berikut ini adalah agenda *Formal Exploratory Talks* yang sudah di laksanakan oleh presiden Benigno Aquino III :

Tabel 4.1

Kegiatan *Formal Exploratory Talks* Masa Presiden Benigno Aquino

Nama Pertemuan	Isi Pertemuan
<i>Formal Exploratory Talks</i> ke 20 dan 21	Pemerintah Filipina, mengklarifikasi revisi draft perdamaian yang diberikan MILF
<i>Formal Exploratory Talks</i> ke 22 dan 27	Pemerintah Filipina memberikan proposal perdamaian 3-for-1 ke MILF (<i>Moro Islamic Liberation Front</i>) serta membuat dasar-dasar point kebijakan yang ditanda tangani oleh perwakilan pemerintah dan MILF (<i>Moro Islamic Liberation Front</i>)
<i>Formal Exploratory Talks</i> ke 28	Kedua belah pihak setuju untuk kembali ke ke aturan-aturan tentang posisi di pemerintahan, pembagian kekuasaan, pembagian kekayaan, tatacara transis dan normalisasi terhadap otonomi khusus yang akan menggantikan ARMM (<i>Organic Act of thee Autonomous Region of Muslim Mindanao</i>)
<i>Formal Exploratory Talks</i> ke 29	Kedua pihak mendiskusikan tentang mekanisme dan realisasi politik baru yang akan menggantikan ARMM (<i>Organic Act of thee Autonomous Region of Muslim Mindanao</i>) yang berisi poin poin

	keputusan dalam prinsip-prinsip
<i>Formal Exploratory Talks</i> ke 30 dan 32	Partai-partai mengorganisir perwakilan mereka dalam <i>Technical Working Groups</i> (TWGs) perihal pembagian kekuatan dan kekayaan, serta pembuatan kerangka perjanjian
<i>Formal Exploratory Talks</i> ke 34	Berakhir dengan progres besar daftar Annexes serta <i>Technical Working Groups</i> (TGWs) membahas masalah kesepakatan transisi dan modalitas
<i>Formal Exploratory Talks</i> ke 35	Membahas masa acuan untuk <i>Third Party Monitoring Team</i> (TMPT) ditandatangani. Badan ini merupakan badan yang akan meriview, akses, evaluasi dan monitor implementasi FAB dan Annexes
<i>Formal Exploratory Talks</i> ke 36	Annex dalam kesepakatan transis dan modalitas (TAM) ditandatangani. Kesepakatan ini berisi detail jalur menuju pembuatan Bangsamoro yang juga berisi acuan jangka waktu untuk <i>Independent Commission on Policing</i> (ICP), disiapkan oleh <i>Technical Working Groups</i> (TWGs) dalam normalisasi yang juga ikut ditandatangani ³

³ <http://opapp.gov.ph/media/infographic/gph-milf-peace-process-timeline> diakses pada 15 Oktober 2014

Keseriusan presiden Benigno Aquino dalam menyelesaikan konflik juga diimbangi dengan hasil positif, dimana sepanjang tahun 2012 tercatat tidak terjadi perang kecil antara pemerintah Filipina dengan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*).⁴ Hal positif ini bisa terwujud karena kebijakan militer presiden Benigno Aquino yang menggunakan *soft diplomacy* dan tidak memerintahkan militer bersikap represif.

Kebijakan militer di bawah presiden Benigno Aquino, menempatkan sekitar 12.000 tentaranya di Mindanao. Tentara yang dikirim oleh Benigno Aquino III di Mindanao untuk mengantisipasi terjadinya kerusuhan atau konflik yang terjadi di Mindanao, tidak seperti pada masa presiden Arroyo yang bersikap cukup represif. Hal ini juga untuk mengantisipasi jika terjadi upaya-upaya penculikan atau kerusuhan yang bertujuan untuk menghentikan proses perdamaian yang sedang berlangsung.

Jejomar Binay yang menjabat wakil presiden Filipina melakukan pendekatan dengan Nur Misuari yang juga merupakan teman Jejomar satu Universitas. Hal ini untuk mempermudah proses perdamaian dan juga untuk menanggulangi sikap-sikap MNLF yang berusaha untuk menghentikan proses perdamaian yang sedang berlangsung antara pemerintah Filipina dan MILF.

Pertemuan antara perwakilan pemerintah Filipina dengan perwakilan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) juga dilakukan untuk membahas masalah draft perdamaian yang tengah di susun. Presiden Benigno Aquino sendiri pernah

⁴ *Ibid*

bertemu langsung dengan salah satu pemimpin MILF (*Moro Islamic Liberation Front*), Murad Ebrahim pada tanggal 4 Agustus 2011 di Jepang. Peluncuran program Sajahtera Bangsamoro bertempat di Bangsamoro Leadership and Management Institute yang berada di Sultan Kudara, Maguindanao pada tanggal 11 Februari 2013. Launching program ini dilakukan oleh presiden Benigno Aquino III serta pemimpin MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) yaitu Murad Ebrahim.

Setelah peluncuran program Sajahtera Bangsamoro, 2 hari kemudian tepatnya tanggal 13 Februari presiden Benigno Aquino III membuat satuan tugas Bangsamoro Development melalui Administrative Order No.32. Fungsi satuan tugas ini adalah untuk memastikan proses implementasi terhadap program Sajahtera Bangsamoro.

Pembentukan team *Technical Working Groups* (TWGs) yang berasal dari pihak pemerintah Filipina dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) merupakan salah satu cara untuk mempermudah proses negosiasi antara kedua belah pihak dan juga untuk meminimalisir kesalahan tafsir yang pernah terjadi pada masa presiden Ferdinand Marcos. Sehingga kesepakatan dan keputusan yang dibuat merupakan hasil diskusi yang intensif yang dilakukan oleh team ini. Setiap pertemuan *Technical Working Groups* (TWGs) membahas perihal hukum-hukum atau kejelasan aturan antara sistem pemerintah Filipina dengan otonomi khusus di Mindanao agar tidak terjadi tumpang tindih di dalam pemerintahan.

Sikap pemerintah Filipina yang memerangi terorisme juga merupakan salah satu faktor dari *negative peace*. Kelompok Abu Sayyaf yang awalnya merupakan kelompok perjuangan kemerdekaan Mindanao berubah dan bergeser menjadi kelompok terorisme dan bandit. Perilaku kelompok Abu Sayyaf yang sering melakukan aksi penculikan kemudian meminta uang tebusan menjadi masalah bagi pemerintah Filipina.

Pemerintah Filipina yang berusaha untuk menghentikan aksi kelompok Abu Sayyaf juga di dukung oleh kelompok MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) sendiri. MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) tidak sepakat dan tidak setuju dengan cara kelompok Abu Sayyaf yang sering melakukan penculikan dan meneror perdamaian yang coba di bentuk oleh pemerintah Filipina dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*). Sehingga sikap bersama melawan gerakan kelompok Abu Sayyaf dibuat oleh pemerintah Filipina dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*).

Kebijakan-kebijakan politik yang dibuat dan diambil oleh presiden Benigno Aquino merupakan salah satu wujud keseriusannya dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Mindanao. Penggunaan cara *positive peace* dan *negative peace* dalam kategori *survival* merupakan salah satu cara yang dirasa efektif untuk mengurangi konflik bersenjata dan mempercepat proses perdamaian. Mulai dari upaya gencatan senjata dan mencegah gerakan terorisme Abu Sayyaf dari segi *Negative Peace*. Kebijakan presiden Benigno Aquino III untuk melanjutkan *Formal Exploratory Talks* yang sudah berjalan pada masa presiden Arroyo diteruskan.

Berbagai panelis dibentuk oleh presiden Benigno Aquino seperti *Technical Working Groups* (TWGs) yang merancang dan membahas isu-isu mengenai hukum-hukum dan sistem politik di Mindanao. *The Framework Agreement on the Bangsamoro* (FAB) yang merupakan hasil dari negosiasi perdamaian antara pemerintah Filipina dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) yang juga didukung oleh kebijakan presiden Benigno Aquino melalui Executive Order 120 untuk memastikan proses implementasi program *The Framework Agreement on the Bangsamoro* (FAB).

B. Kebijakan Ekonomi

Sektor perekonomian merupakan salah satu sektor yang penting dan menjadi sangat sensitif bagi masyarakat. Salah satu kategori teori yang dikemukakan Johan Galtung yaitu *Development* dalam 8 komponen perdamaian. *Positive peace* dalam kategori *Development* adalah pemenuhan kebutuhan setiap individu dan perkembangan perekonomian di daerah yang terjadi konflik tersebut.

Sedangkan dalam *Negative Peace* lebih kepada bantuan atau cara untuk menuntaskan kemiskinan agar setiap masyarakat yang berada di wilayah konflik tersebut bisa memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri. Teori yang dikemukakan Johan Galtung ini diimplementasikan oleh presiden Benigno Aquino III dalam rangka proses perdamaian di Mindanao.

Mindanao merupakan daerah yang berada di selatan Filipina, berbatasan dengan laut Sulu di sebelah Barat, laut Filipina di sebelah Timur dan laut

Sulawesi di sebelah Selatan.⁵ Mindanao menjadi daerah konflik berkepanjangan yang tak kunjung selesai antara pemerintah Filipina dan para kelompok pejuang Mindanao atau dikenal dengan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) dan MNLF (*Moro National Liberation Front*). Konflik yang berawal dari perbedaan budaya dan identitas Mindanao yang kental dengan budaya Islam, sedangkan pemerintah Filipina berbudaya kristen.

Perekonomian menjadi salah satu aspek yang paling penting untuk menjaga kestabilan kehidupan masyarakat. Mindanao yang menjadi daerah konflik membuat kestabilan dalam sektor perekonomian menjadi terganggu, apalagi Mindanao merupakan wilayah penghasil produk pertanian. Kesejahteraan masyarakat Mindanao menjadi permasalahan baru yang muncul disamping permasalahan konflik dengan pemerintah Filipina.

Melihat permasalahan ekonomi yang dirasakan oleh wilayah konflik seperti di Mindanao, membuat salah satu presiden yang pernah menjabat di tahun 1992-1998, Fidel V Ramos membuka investasi di Mindanao dan hasilnya dana sekitar 80 juta US\$ akan di investasikan untuk perbaikan sektor perekonomian di Mindanao.⁶ Investasi tersebut tidak hanya diharapkan mampu untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Mindanao, tetapi lebih memperlihatkan bahwa Mindanao wilayah yang aman dan menjanjikan untuk berinvestasi.

⁵ <http://www.philippines.hvu.nl/maps.htm> diakses pada tanggal 3 Oktober 2014

⁶ Surwandono dan Sidiq Ahmadi, *Resolusi Konflik Dunia Islam*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 177

Usaha untuk meningkatkan dan memulihkan perekonomian di Mindanao juga dilakukan oleh presiden Benigno Aquino III. Hasilnya terlihat bagaimana perekonomian di Mindanao berkembang cukup baik. Salah jalan untuk mempercepat perkembangan ekonomi di Mindanao dengan cara membuka pintu investasi ke kepada asing untuk berinvestasi di Filipina. Berikut data investasi yang dilakukan di Mindanao sepanjang tahun 2012 :

Tabel 4.2

Proyek Investasi di Mindanao Tahun 2012

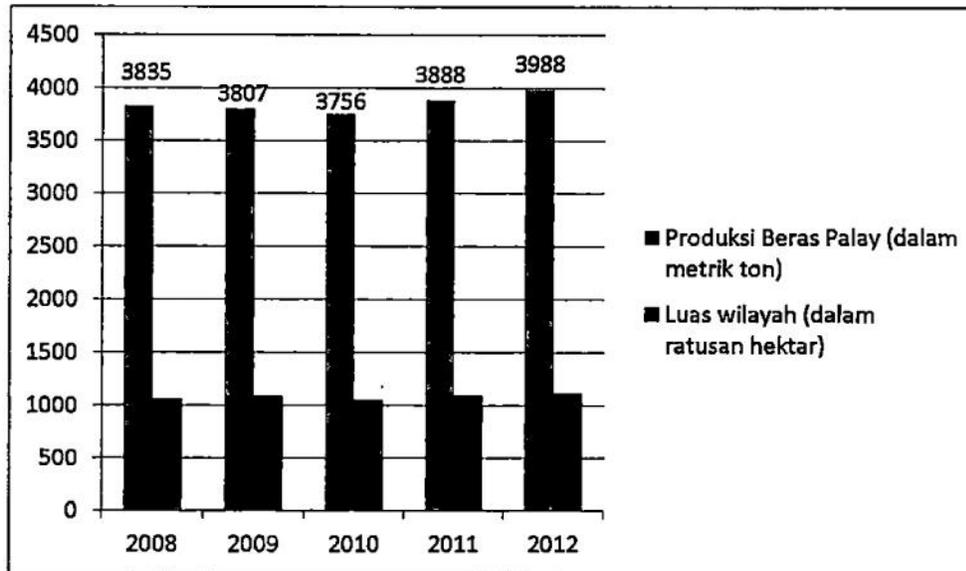
	Jumlah Investasi	Proyek	Total Investasi (dalam juta peso)	Jumlah Pegawai
Region IX	4		2,554.05	2,587
Region X	7		2,589.49	793
Region XI	15		5,011.25	2,109
Region XII	10		1,237.88	1,035
CARAGA	4		7,961.49	576
Total	32		19,354.16	7,100

Sumber : Republic of the Philipphines Mindanao Development Authority

Perkembangan sektor investasi di Mindanao juga mendongkrang sektor perekonomian lainnya seperti sektor pertanian yang memang menjadi salah satu sektor yang paling penting yang ada di Mindanao. Pada tahun 2012 salah satu sektor pertanian Filipina yaitu beras dan jagung berkembang cukup signifikan :

Diagram 4.1

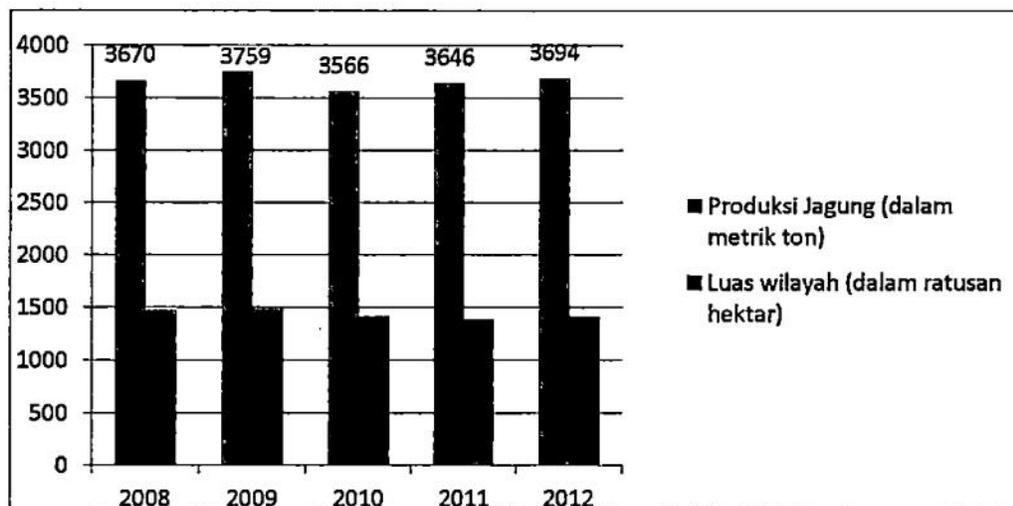
Produksi Beras di Mindanao Tahun 2008-2012



Sumber : Republic of the Philippines Mindanao Development Authority

Diagram 4.2

Produksi Jagung Tahun 2008-2012



Sumber : Republic of the Philippines Mindanao Development Authority

Meningkatnya jumlah hasil pertanian dari tahun ke tahun membuat kehidupan masyarakat Mindanao kembali normal dan turut memajukan aspek pembangunan yang sebelumnya terhambat oleh konflik. Meningkatnya pertanian memang mendapat dukungan dari pemerintah Filipina melalui kebijakan Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) yang dibuat pada masa presiden Corazon Aquino.⁷

Presiden Benigno Aquino sangat mendukung kebijakan ini dan memberlakukannya pada masa pemerintahannya yang sekarang. Kebijakan ini berisi mengenai pembelian tanah lebih dari 7 hektar dan dijual kepada para petani untuk bercocok tanam. Pembayaran tanah yang bisa di credit selama 15 tahun untuk memperingan para petani untuk membeli tanah tersebut.

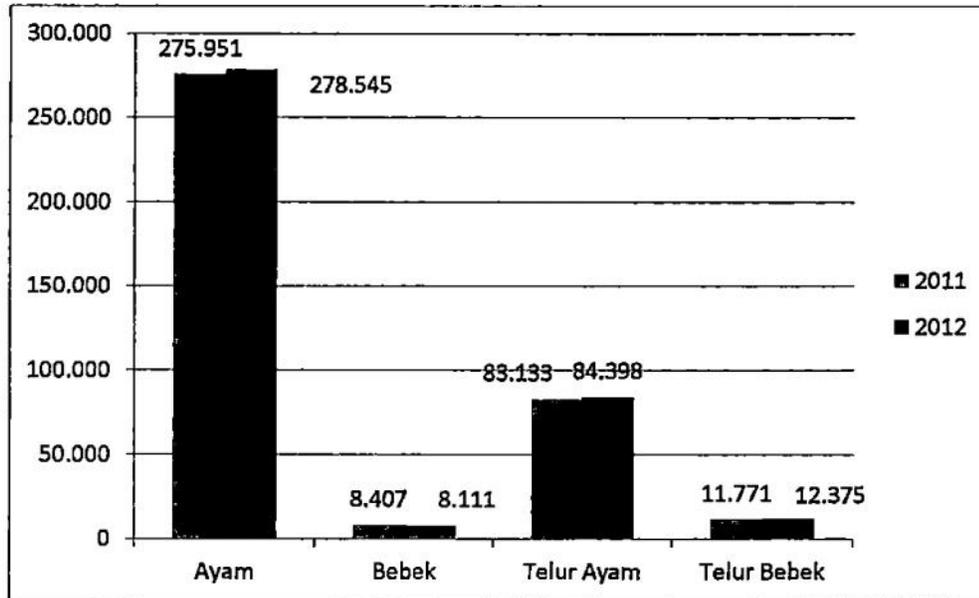
Selain sektor pertanian yang memang menjadi andalan di Mindano, sektor peternakan atau hewan ternak juga berkembang lebih baik. Peningkatan terhadap jumlah hewan ternak menjadi salah satu indikasi meningkatnya perekonomian yang ada di Mindanao. Hewan ternak yang juga menjadi salah satu sektor perekonomian yang cukup banyak berpengaruh dalam kemajuan ekonomi di Mindanao.

⁷ Mary Ann B. Manahan, Programme Officer, *The State of Agrarian Reform Under President Benigno Aquino III's Government*, Focus on the Global South-Philippines, Filipina, 2013 hlm 8

Berikut diagram perkembangan jumlah hewan ternak yang ada di Mindanao tahun 2011-2012 :

Diagram 4.3

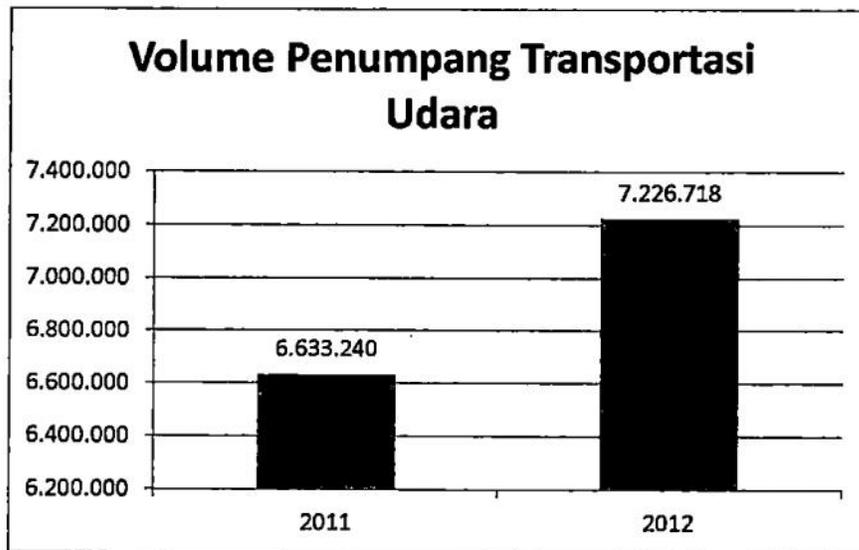
Jumlah Hewan Ternak di Mindanao Tahun 2011-2012



Sumber : Republic of the Philippines Mindanao Development Authority

Perekonomian yang berkembang di Mindanao juga didukung oleh akses ke Mindanao yang juga ikut meningkat. Salah satu sarana transportasi melalui transportasi udara merupakan salah satu transportasi yang meningkat di Mindanao. Peningkatan jumlah penumpang pesawat yang datang atau dari Mindanao di tahun 2011-2012 mengalami kenaikan yang cukup besar.

Diagram 4.4



Jumlah Pengguna Transportasi Udara di Mindanao Tahun 2011-

2012 Sumber : Republic of the Philippines Mindanao Development Authority

Upaya presiden Benigno Aquino III dalam mendorong perekonomian yang ada di Mindanao merupakan salah satu cara untuk mengembangkan potensi ekonomi yang ada di Mindanao. Pertanian dan peternakan merupakan sektor andalan di Mindanao dan terus berusaha di tingkatkan untuk menjadi salah satu provinsi yang memiliki kekuatan ekonomi di Filipina.

Permasalahan konflik yang terjadi di Mindanao berdampak cukup banyak dalam perekonomian masyarakatnya. Sehingga pemulihan ekonomi di Mindanao menjadi salah satu fokus agar masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jumlah pengangguran di Mindanao juga tidak lebih dari 5% selama tahun 2012. Berikut tabel perbandingan masyarakat yang menganggur dan bekerja di wilayah Mindanao, Visayas dan Luzon

Tabel 4.3

Masyarakat di Filipina yang Bekerja dan Menganggur 2012

	Jumlah Masyarakat yang Bekerja	Jumlah Masyarakat yang Menganggur
Mindanao	9.203.000 / 95,73%	411.000 / 4,27%
Visayas	7.661.000 / 93,82%	506.000 / 6,6%
Luzon	20.803.000 / 91,85%	1.848.000 / 8,8%

Sumber : Republic of the Philippines Mindanao Development Authority

Pengangguran di Mindanao paling rendah jika di bandingkan Visayas dan Luzon. Sehingga upaya penetasan kemiskinan dan membantu masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri bisa dipenuhi. Kebijakan-kebijakan presiden Benigno Aquino III untuk memberantas kemiskinan dan membuat masyarakat di Mindanao bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Kebijakan mengenai tanah yang dibeli pemerintah kemudian diberika ke masyarakat yang bisa dicicil sampai 15 tahun salah satunya.

Presiden Benigno Aquino III sadar bahwasanya masyarakat di Mindanao memang memiliki keahlian dan potensi dalam pertanian dan ternak. Sehingga kebijakan tanah sangat membantu masyarakat di Mindanao. Apalagi pasca banyaknya masyarakat di Mindanao yang kehilangan tanahnya akibat kebijakan pada masa presiden Ferdinand Marcos.

Proses perdamaian yang berjalan juga membantu mengkondusifkan wilayah Mindanao dari konflik baku tembak. Situasi ekonomi yang kian membaik dan stabil serta didukung oleh proses perdamaian yang terus berlangsung untuk mengkondusifkan wilayah Mindanao. Keseriusan dalam proses perdamaian dalam meja perundingan berhasil meminimalisir perang atau baku tembak antara pemerintah Filipina dengan kelompok perjuangan Moro, tercatat tahun 2012 tidak terjadi baku tembak atau kekerasan yang terjadi di Mindanao.

C. Kebijakan Politik

Salah satu kategori yang dijelaskan dalam teori 8 komponen perdamaian menurut Johan Galtung adalah *Freedom* atau kebebasan. Kebebasan yang berarti tidak terjadinya kekerasan yang disebabkan oleh kekuatan politik. Pentingnya kebebasan dalam sebuah wilayah yang berkonflik juga dibagi menjadi *Positive Peace* dan *Negative Peace* yang masing-masing merupakan penjelasan terhadap kebebasan dari kekerasan struktural II menurut Johan Galtung.

Positive Peace lebih memfokuskan kebebasan dalam hal kediktatoran pemerintah yang baik dan partisipasi, self-determinasi, hak asasi manusia. Sedangkan *Negative Peace* lebih menjelaskan mengenai pembebasan dari penindasan dan penjajahan. Hal ini juga di implementasikan oleh presiden Benigno Aquino III dalam menyelesaikan konflik di Mindanao.

Sikap politik yang di ambil oleh presiden Benigno Aquino III yang menggunakan *Soft Diplomacy* dibandingkan dengan militer merupakan salah satu cara untuk meminimalisir konflik bersenjata antara pemerintah dan MILF (*Moro*

Islamic Liberation Front). Sehingga perasaan tertindas dan terjajah oleh pemerintah Filipina tidak di rasakan oleh masyarakat Mindanao.

Sikap pemerintah yang baik dan partisipasi dalam mewujudkan keinginan masyarakat Mindanao untuk memiliki sistem politik sendiri coba di wujudkan melalui program-program yang dirancang dan di sepakati antara pemerintah Filipina dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) sebagai representatif dari masyarakat Mindanao. Peluncuran program Sajahtera Bangsamoro merupakan salah satu wujud kebijakan yang positif yang di bentuk oleh pemerintah Filipina dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) dalam upaya menyelesaikan konflik.

Kebijakan presiden Benigno Aquino untuk terus mendengarkan dan bernegosiasi dengan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) dalam upaya mencari jalan tengah antara pemerintah Filipina dan masyarakat Mindanao yang ingin memiliki sistem politik sendiri, tetapi Mindanao masih berada di dalam wilayah administrasi Filipina. Sehingga penindasan dan kebebasan politik yang di inginkan oleh masyarakat Mindanao bisa diwujudkan melalui otonomi khusus.

Partisipasi yang baik dari pemerintah dalam upaya menyelesaikan konflik sangat membantu mempercepat terbentuknya draft perdamaian dan kesepakatan antara pemerintah Filipina dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*). Kejelasan dan keseriusan dalam pembuatan draft perdamaian ini juga di dukung dengan upaya implementasi program yang juga diawasi oleh satuan tugas untuk mengawasi perkembangan Mindanao melalui Administrative Order No.32.⁸

⁸ <http://opapp.gov.ph/media/infographic/gph-milf-peace-process-timeline> diakses pada 15 Oktober 2014

Pembentukan kelompok Technical Working Groups (TWGs) yang berisi panelis-panelis dari pemerintah Filipina dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) yang membahas berbagai permasalahan dan juga membuat dasar-dasar hukum serta pembagian kekuasaan antara pemerintah Filipina dan masyarakat Mindanao agar tidak terjadi tumpang tindih dan kesalahpahaman dalam proses implementasi nanti.

Presiden Benigno Aquino III juga meminimalisir pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang biasanya sering terjadi pada daerah-daerah konflik. Sikap untuk memastikan HAM (Hak Asasi Manusia) untuk tetap terjaga dari pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan wujud keseriusan presiden Benigno Aquino III dalam menyelesaikan konflik.

Keseriusan presiden Benigno Aquino III untuk menjaga HAM (Hak Asasi Manusia) masyarakat Mindanao terlihat dalam kebijakan Executive Order 120 yang menegaskan proses implementasi program Sajahtera Bangsamoro dan hukum-hukum otonomi yang akan berlaku di Mindanao, dimana terdapat hukum-hukum yang mengatur *Basic Law* yang di dalamnya terkandung aturan HAM.⁹

Pentingnya menjaga dan menghargai HAM (Hak Asasi Manusia) yang diatur dalam kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Technical Working Groups (TWGs) untuk memastikan tidak adanya pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi. Selain menghargai HAM (Hak Asasi Manusia), ada komponen lain dalam kategori *Freedom* yang dibahas oleh Johan Galtung

⁹ <http://www.opapp.gov.ph/milf/news/frequently-asked-questions-draft-bangsamoro-basic-law#sthash.1GdHs7Q7.dpuf> diakses pada 15 Oktober 2014

dalam 8 komponen perdamaian, yaitu mengenai kebebasan memilih. Kebebasan memilih dalam artinya memilih untuk hal-hal yang mempengaruhi kehidupan orang tersebut.

Pemilihan politik atau sistem politik yang ingin diterapkan merupakan salah satu contoh kongkrit yang di upayakan oleh MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) dan didengar oleh pemerintah. Keinginan ini coba di bicarakan oleh pemerintah Filipina dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*). Keinginan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) untuk memiliki sistem pemerintahan sendiri, sedangkan pemerintah Filipina ingin Mindanao tetap menjadi bagian dari wilayah administratif Filipina.

Keinginan awal MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) untuk memerdekakan Mindanao dari Filipina, bergeser menjadi penggunaan otonomi khusus di wilayah tersebut. Hal ini dianggap merupakan jalan tengah yang bisa membuat kedua belah pihak merasa puas. Pemerintah Filipina yang tidak kehilangan Mindanao dan juga keinginan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) untuk memiliki sistem politik sendiri mejadi solusi terbaik untuk menghentikan konflik.

Meskipun upaya otonomi khusus ini pernah diupayakan pada masa presiden Ferdinand Marcos melalui Tripoli Agreement. Kemudian dianggap gagal karena terjadinya salah tafsir atau penafsiran sendiri oleh presiden Ferdinand Marcos yang membuat MNLF (*Moro National Liberation Front*) ketika itu menjadi representatif dari Mindanao kecewa dan tidak mau mengikuti isi perjanjian Tripoli Agreement.

Presiden Benigno Aquino III terlihat sangat serius memberikan kebebasan politik yang di inginkan masyarakat Mindanao. Sikap politiknya yang tidak represif, tentu saja bernilai positif untuk menghentikan sikap penindasan yang di rasakan oleh masyarakat di Mindanao. Keseriusan presiden Benigno Aquino III untuk menghargai dan meminimalisir pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang terjadi di Mindanao merupakan bentuk keseriusan presiden Aquino dalam melindungi masyarakat di Mindanao yang merupakan bagian atau rakyat dari Filipina.

Kediktatoran yang tidak dilakukan oleh presiden Benigno Aquino III merupakan salah satu dari sekian banyak pendekatan yang di upayakan untuk menyelesaikan konflik di Mindanao. Pendekatan secara *Soft Diplomacy* melalui *Formal Exploratory Talks* merupakan upaya perundingan dan pembentukan perjanjian perdamaian antara pemerintah Filipina dan MILF (*Moro Islamic Liberation Front*).

Partisipasi politik dalam hal menentukan sendiri sistem politik yang ingin dipakai oleh masyarakat Mindanao merupakan salah satu alasan kenapa terjadi keinginan memerdekakan diri dari pemerintah Filipian. Presiden Benigno Aquino III mencoba untuk memberikan ruang khusus melalui otonomi khusus kepada Mindanao.

Sehingga mereka tetap bisa berpartisipasi politik dan menjalankan hak politiknya, dalam otonomi khusus yang di bangun dan di rancang oleh Technical Working Groups (TWGs). Sehingga masyarakat Mindanao bisa

memilih gubernur dan mengatur sendiri urusan politiknya melalui otonomi khusus, tetapi tetap berada di bawah pemerintah Filipina.

Hal ini juga berdampak pada peningkatan dalam hal pendidikan di Mindanao. Partisipasi masyarakat terhadap akses pendidikan semakin baik. Peningkatan tersebut merupakan salah satu indikasi berhasilnya pendekatan dan kebijakan yang dibuat oleh presiden Benigno Aquino III. Berikut tabel partisipasi pendidikan di Filipina :

Tabel 4.4

Lulusan Elementary Graduate Tahun 2008 dan 2012 di Filipina

	Elementary Level Tahun 2008	Elementary Graduate Tahun 2008	Elementary Graduate Tahun 2012
Philippines	67	80,8	103,22
Region IX	59,3	78,4	107,68
Region X	63,2	84,6	98,21
Region XI	65,1	76,6	98,57
Region XII	57,5	74,3	97,65
CARAGA	63	82	95,01

Sumber : Republic of the Philipphines Mindanao Development Authority

Tabel diatas menunjukkan peningkatan jumlah lulusan yang terjadi di Mindanao, dimana tahun 2008 hanya sebesar 82 meningkat menjadi 95,01 tahun 2012. Peningkatan ini semakin menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Mindanao juga meningkat baik.

Sehingga kekerasan struktral II berupa perampasan kebebasan memilih serta partisipasi dalam kebijakan-kebijakan yang berdampak bagi kehidupan orang itu sendiri tidak terjadi di Mindanao. Kekerasan yang disebabkan kekuatan politik merupakan masalah yang saat ini tengah di selesaikan oleh presiden Beniqno Aquino III. Sehingga perasaan tertindas, terjajah kemudian kehilangan hak partisipasi politik dan hak berpolitik serta tidak di hargainya HAM (Hak Asasi Manusia) tidak terjadi di Mindanao melalui upaya-upaya kebijakan politik presiden Beniqno Aquino III.